

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia telah memasuki masa pemulihan, dimana sebelumnya terjadi krisis ekonomi yang sangat hebat. Pemerintah Indonesia berupaya untuk mengatasinya dengan melakukan Reformasi, Era reformasi yang dimulai pada tahun 1998, bangsa Indonesia telah maju selangkah lagi menuju era keterbukaan. Dalam era ini, masyarakat semakin menyadari hak dan kewajiban mereka sebagai warga Negara dan dapat menyampaikan aspirasi yang berkembang, salah satunya perbaikan terhadap sistem pengelolaan keuangan pada badan-badan pemerintah yang ada di Indonesia.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban (BPKP, 2011). Dengan informasi dan pengungkapan tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mau dan mampu menjadi subyek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten, dan dapat dipercaya. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan

sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. (Bastian,2006).

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Dengan adanya sasaran anggaran yang jelas aparat pelaksana anggaran juga akan terbantu dalam perealisasiannya, secara tidak langsung ini akan mempengaruhi terhadap kinerja aparat. Salah satu penyebab tidak efektif dan efisiennya anggaran dikarenakan ketidakjelasan sasaran anggaran yang mengakibatkan aparat pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam penyusunan target-target anggaran (Chici, 2013).

Penelitian tentang pengaruh kejelasan sasaran anggaran pada public diantaranya Anjarwati (2012) yang menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara kejelasan sasaran anggaran dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Demikian juga, Primayoni (2014) yang juga menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengendalian merupakan suatu proses melalui manajemen suatu organisasi membuat keyakinan yang beralasan bahwa sumber daya digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai misi dan rencana organisasi, pelaporan keuangan, dan kebijakan, hukum, peraturan yang relevan diikuti. Pemanfaatan sumber daya secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata dapat dilakukan apabila dilakukan pengendalian manajemen

yang baik. Salah satu jenis pengendalian manajemen adalah pengendalian keuangan (*financial control*) dengan memanfaatkan sistem akuntansi (Darma, 2004).

Untuk memantau dan mengendalikan kinerja atasan dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan diperlukan sistem pelaporan yang baik. Indraswari (2010) mengemukakan, laporan yang baik adalah laporan harus disusun secara jujur, objektif, dan transparan. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Mardiasmo (2009) berpendapat, laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati *trend* antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada.

Dalam penelitian Yulianti (2014), dan Anjarwati (2012) menunjukkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun demikian terdapat ketidakkonsistenan dari hasil penelitian Risma (2009) yang menyatakan sistem pelaporan tidak menunjukkan adanya pengaruh terhadap persepsi aparatur pemerintah daerah atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Peneliti memilih objek ini di karenakan pada penelitian sebelumnya belum pernah ada penelitian tentang "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah " yang di lakukan di kabupaten Jepara.

Kebijakan yang ada pada daerah yang satu dengan daerah yang lain pasti berbeda, sehingga sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan tingkat akuntabilitas suatu daerah juga berbeda. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengangkat judul penelitian ini dengan judul **"Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Jepara"**.

1.2. Ruang Lingkup Masalah

Dalam pembatasan nantinya supaya tidak terlalu luas, maka diperlukan batasan-batasan yang jelas. Sehingga permasalahan tidak keluar dari jalur yang diinginkan. Ruang lingkup penelitian dalam penelitian ini yaitu obyek penelitian ini di fokuskan pada seluruh OPD wajib Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang ada di kabupaten jepara.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah peneliti tulis, maka di terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Apakah Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Jepara?
2. Apakah Pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Jepara?
3. Apakah Sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Jepara ?
4. Apakah Kejelasan sasaran anggaran, Pengendalian akuntansi, dan Sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Kabupaten Jepara ?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah agar dapat mengetahui adanya :

1. Pengaruh Kejelasan Sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Jepara.
2. Pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Jepara.
3. Pengaruh sistem pelaporan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Jepara.

4. Pengaruh Kejelasan sasaran anggaran, Pengendalian akuntansi, dan Sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Kabupaten Jepara

1.5. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun Manfaat dari hasil penelitian adalah

1. Bagi penulis, penulis dapat menambah atau memperluas wawasan serta pengalaman dalam bidang akuntansi pemerintahan khususnya dalam mengetahui kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jepara dan meningkatkan keterampilan dalam melakukan penelitian.
2. Bagi Pemerintah Daerah, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran tentang bagaimana pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Jepara.
3. Bagi penelitian selanjutnya, semoga dapat dimanfaatkan atau dijadikan sebuah referensi dan acuan atau dapat menjadi bahan masukan di bidang penelitian yang sejenis.